

PDF Compressor Free Version
**Teori World System dan Pemenuhan Tenaga Kerja
Kompeten**

Abdillah Benteng¹ dan Amar²

¹Program Studi Teknik Pembuatan Garmen, ²Program Studi Teknik Pembuatan Kain Tenun,
Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
Jl. Ki Hajar Dewantara, Jebres, Surakarta, 57126

Email: ¹abdillah.benteng.akom@gmail.com, ²amarnajamuddin@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul “Teori World System dan Pemenuhan Tenaga Kerja Kompeten”. Dengan menggunakan studi pustaka, penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana peran komunikasi dalam pembangunan berkaitan dengan arah perubahan, dimana teori-teori komunikasi dan pembangunan erat sekali hubungannya. Teori pembangunan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teori ini membagi dunia secara geografis menjadi tiga kelompok, yaitu 1) Kategori Inti (Kelompok Pusat), 2) Semi Periperi (Kelompok Antara) 3) *Periperi* (Kelompok Pinggiran). Indonesia pada awalnya masuk ke dalam kelompok Periperi tetapi dalam beberapa dekade belakangan ini Indonesia sudah masuk ke dalam Semi Periperi disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi berbasis pada ekspor industri, ekspor minyak, dan statusnya sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Penekanan pada teori ini adalah, negara-negara di dunia bisa naik dan juga bisa turun kelas. Salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh pada suatu negara adalah tenaga kerja. Pasar bebas yang diterapkan menuntut setiap negara di Asean berlomba-lomba dalam bidang perdagangan maupun tenaga kerja. Terkait dengan Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia, terutama setelah dimulainya MEA, persaingan dalam dunia kerja sungguh terasa. Banyak orang asing berdatangan ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Tenaga kerja harus diberi informasi (melalui media personal dan non personal), dimotivasi oleh penyuluh (agen pembaharu) untuk dapat menerima ide, pengetahuan dan teknologi baru sehingga berani memutuskan masa depannya. Dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan, pemerintah perlu mengoptimalkan peran komunikasi antar berbagai pihak (pemerintah, sektor industri, lembaga pendidikan kompetensi, media massa dan masyarakat secara luas) agar tercipta suatu sinergisme dan keselarasan melalui pendekatan teori komunikasi konvergensi.

Kata Kunci: Teori Word Sistem, Komunikasi Pembangunan, Kompetensi Tenaga Kerja

ABSTRACT

This article is entitled “The Theory of the World System and the Fulfillment of a Competent Workforce”. By using literature study, the author tries to describe how the role of communication in development is related to the direction of change, where communication and development theories are closely related. The theory of development has developed very rapidly. This theory divides the world geographically into three groups, namely 1) Core Category (Central Group), 2) Semi Peripheral (Intermediate Group) 3) Periphery (peripheral group). Indonesia was originally included in the Periphery group but in recent decades Indonesia has entered the Semi Periperi group due to economic growth based on industrial exports, oil exports, and its status as the fourth most populous country in the world. The emphasis on this theory is, countries in the world can go up and down class. One of the most influential components of the economy in a country is labor. The applied free market requires every ASEAN country to compete in the fields of trade and labor. Regarding foreign workers who will work in Indonesia, especially after the start of the MEA, competition in the world of work is really felt. Many foreigners come to Indonesia in search of work. The workforce must be informed (through personal and non-personal media), motivated by extension agents (renewal agents) to be able to

PDF Compressor Free Version

accept new needs, knowledge and technology so that they dare to decide their future. In implementing various development programs and policies in the field of manpower, the government needs to optimize the role of communication between various parties (government, industrial sector, competency education institutions, mass media and society at large) in order to create a synergy and harmony through a convergence communication theory approach.

Keywords: *Word System Theory, Development Communication, Workforce Competence*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dirumuskan sebagai suatu proses untuk menciptakan perubahan yang berjalan kearah yang lebih baik untuk membawa berbagai kemajuan dalam kehidupan masyarakat (Priatama, 2013). Pada proses program pembangunan, komunikasi merupakan komponen penting. Komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial sehingga perubahan yang dikehendaki mengarah pada pembangunan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya (Dilla, 2007). Peran komunikasi dalam pembangunan berkaitan dengan arah perubahan. Teori-teori komunikasi dan pembangunan erat sekali hubungannya. Menurut Indardi dalam Sulaiman dkk (2016) komunikasi dipercaya sebagai salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan komunikasi yang dirancang untuk mendukung program pembangunan tertentu (Farihanto, 2016). Dalam praktek, aliran informasi disetiap negara diatur oleh ideologi pembangunan negara tersebut atau dapat dikatakan bahwa setiap usaha penggunaan komunikasi massa bagi pembangunan selalu memiliki dasar teoritis dan usaha tersebut juga memiliki suatu konsep tentang pembangunan.

Dari sejarah perubahan dalam mengonseptualisasikan pembangunan, terdapat berbagai variasi cara mendefinisikan pembangunan. Mula-mula pembangunan hanya diartikan secara ekonomi, kemudian berkembang bahwa pembangunan juga dilihat sebagai suatu konsep yang dinamis dan bersifat multidimensional atau mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya. Pembangunan menggambarkan tentang kualitas hidup, kesetaraan dan partisipasi sosial, hal ini menjelaskan di seluruh dunia bahwa pembangunan tidak berakhir di bidang ekonomi atau industry (Age, Obinne, & Demenongu, 2012). Berbagai istilah yang sering digunakan dalam menjelaskan pengertian pembangunan, seperti perubahan, pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi. Akan tetapi istilah-istilah tersebut tidak sama arti dan maknanya dengan pembangunan, karena pembangunan merupakan rujukan semua yang baik, positif, dan menyenangkan. Sementara perubahan, pertumbuhan, kemajuan, maupun modernisasi dapat saja terjadi tanpa unsur pembangunan. Dilihat dari arti hakiki pembangunan, pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain saja, dan kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan yang terkait dengan kemampuan untuk memilih. Selain itu, arti pembangunan yang dalam juga menyangkut kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang mencakup kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan.

Teori pembangunan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terkait dengan perhatian para ahli terhadap masalah pembangunan, khususnya terhadap pembangunan di negara-negara berkembang yang sangat besar (Kasnawi, 2016). Jumlah teori yang membahas pembangunan yang sangat banyak dan beragam dengan perspektif yang berbeda-beda pula maka untuk membantu memudahkan memahaminya maka teori-teori ini bisa dikelompokkan dalam beberapa perspektif atau paradigma. Suwarsono dan So (1991) dalam mengurai sejumlah teori ini mengelompokkannya berdasarkan tiga perspektif, yaitu perspektif modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Sementara dengan cara yang hampir sama, Arif Budiman (2000) mengklasifikasikan teori pembangunan juga dalam tiga kelompok, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan, yang salah satunya akan kita bahas dalam makalah ini yaitu tentang teori sistem dunia. Teori sistem

PDF Compressor Free Version

dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Sehingga, integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan pasar (ekonomi) daripada kepentingan politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

I. Teori Sistem Dunia

Proses pembangunan di berbagai negara telah berjalan begitu pesat dan melahirkan sejumlah perubahan penting, serta melalui satu konjungtur baru yang sukar ditebak, di bawah bayang-bayang ketidakmenentuan akibat krisis ekonomi yang selalu berulang, namun transformasi perubahan akibat pembangunan itu ada di mana-mana. Terdapat berbagai pergeseran penting, dimana sebagian wilayah dunia mengalami pembangunan dan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara sebagian yang lain justru mengalami stagnasi ataupun bahkan kemerosotan ekonomi. Dalam kaitan ini, para teoritis pembangunan secara terus menerus ditantang untuk menguji Teori Sistem Dunia atau seringkali disebut sebagai Sistem Dunia Modern (*Modern World System*) merupakan satu teori pembangunan yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein. Teori ini muncul pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan teori modernisasi maupun teori ketergantungan (*dependensia*) yang telah muncul sebelumnya, yang dianggap gagal dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan ataupun kemiskinan di negara-negara berkembang (Robert dan Jean Gilpin 2002 dalam Maiwan 2017). Menurut para teoritis sistem dunia, teori ketergantungan hanya bisa menjelaskan gejala terjadinya keterbelakangan saja, tetapi tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di negara berkembang secara memuaskan (Arif Budiman, 2000).

Melalui tulisan-tulisan yang disampaikannya sepanjang tahun 1970-an, Wallerstein melihat kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang dalam kerangka yang lebih menyeluruh sebagai bagian dari mekanisme kerja sistem ekonomi dunia kapitalis yang sudah tertanam kuat. Teori sistem dunia menjadikan dunia sebagai satu unit analisis dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan dan perubahan sosial. Pemahaman dunia sebagai satu unit analisa dilandasi oleh keyakinan bahwa hanya sistem itulah yang menyejarah (*historical system*), yakni yang pernah wujud, berkembang, dan akan terus berkembang ataupun mati dalam peradaban umat manusia. Karena itu Wallerstein menolak penggunaan masyarakat atau negara sebagai unit analisis karena dianggap tidak cukup memadai untuk memahami karakter perubahan secara global. Menurut beliau, sebelum muncul sistem dunia, ada tiga jenis sistem yang telah muncul dalam sejarah kehidupan umat manusia. Pertama adalah sistem mini (*the mini systems*). Kedua, sistem kekaisaran dunia (*the world empires*), dan ketiga, sistem ekonomi dunia (*the world economies*).

Teori Sistem Dunia berpandangan bahwa prospek dan kondisi pembangunan suatu negara secara mendasar dibentuk oleh proses ekonomi dan pola hubungan antar negara dalam skala dunia. Teori ini menekankan bahwa merupakan hal yang sia-sia untuk menganalisis atau membentuk pembangunan dengan memusatkan pada tingkat negara-negara secara individual dimana tiap-tiap negara berakar dalam sebuah sistem dunia. Teori ini muncul saat Perang Dingin, akibat dari konflik Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang memunculkan imajinasi geopolitik baru. Dan menurut para pakar bahwa teori sistem dunia mulai berkembang abad ke-14 ketika perdagangan internasional mulai berkembang dan ketika Eropa berkembang ke dalam jaman penemuan dan penjajahan. Teori ini didasari oleh pandangan Marxisme yang mana teori ini menekankan pada kelompok, negara, imperialisme dan kendali atas alat-alat produksi dan tenaga kerja. Namun teori sistem dunia tidak sependapat terkait teori developmentalisme dalam Marxisme yang berisi gagasan bahwa masyarakat secara bertahap bergerak dari paham feodalisme, kapitalisme dan sosialisme kepada paham komunisme yang dapat dianalisis dan ditransformasi secara individual dan terpisah dari sistem dunia. Teori ini membagi dunia secara geografis menjadi tiga kelompok, yaitu (Wallerstein, 1974) :

PDF Compressor Free Version

1. Kategori Inti (Kelompok Pusat) dimana terdapat pusat-pusat kekuasaan, kekayaan industri, dan pusat pengaruh politik dunia. Negara-negara ini secara kuat mempengaruhi dan memaksakan aturan-aturan tatanan dunia. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang.
2. Semi Periperi (Kelompok Antara) dimana merupakan percampuran antara sifat-sifat dari negara-negara inti seperti perindustrian, kekuatan ekspor, kesejahteraan dan sifat kategori Periperi seperti kemiskinan, kerentanan terhadap pengaruh keputusan asing, kepercayaan pada produk pokok. Dalam kelompok ini adalah kelompok yang paling penuh pergolakan dimana anggotanya paling sering mengalami naik-turun dalam hirarki dunia. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Asia Timur, Amerika Latin, negara pecahan Uni Soviet.
3. *Periperi* (Kelompok Pinggiran) yang merupakan negara-negara yang terbelakang dalam sistem dunia. Kelompok ini hanya menyediakan bahan baku mentah bagi industri maju. Kelompok ini hidup dalam situasi kehidupan yang menyedihkan, kemiskinan dan prospek pembangunan masa depan yang suram. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain mayoritas negara-negara di Afrika.

Perbedaan bagi ketiga jenis negara ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Kelompok negara-negara kuat (pusat) mengambil keuntungan yang paling banyak, karena kelompok ini dapat memanipulasi sistem dunia sampai batas-batas tertentu dengan kekuatan dominasi yang dimilikinya. Kemudian negara setengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir. Munculnya negara semi pinggiran oleh Wallerstein (1984) dikarenakan pemikiran jika hanya terdapat 2 kutub di dunia yaitu negara pusat dan pinggiran saja, maka disintegrasi akan muncul dengan mudah dalam sistem dunia itu. Sehingga, negara semi pinggiran dinilai akan menghindari disintegrasi tersebut. Kemudian, negara semi pinggiran juga dinilai bisa menjadi iklim ekonomi baru. Menurut Muir (2012) kehadiran negara-negara semi pinggiran sesungguhnya diperlukan untuk membawa stabilitas dan perimbangan dalam mencegah eksploitasi yang berlebihan negara-negara pusat kepada negara-negara pinggiran, dimana negara-negara semi pinggiran dapat menjadi bemp (penahan) eksploitasi tersebut dengan membangun aliansi dengan negara-negara pinggiran. Dalam konteks ini, negara-negara semi pinggiran memiliki posisi penting dalam mendinamisasikan keadaan dengan bertindak sebagai inkubator perubahan.

Indonesia pada awalnya masuk ke dalam kelompok Periperi tetapi dalam beberapa dekade belakangan ini Indonesia sudah masuk ke dalam Semi Periperi disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi berbasis pada ekspor industri, ekspor minyak, dan statusnya sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Penekanan pada teori ini adalah, negara-negara di dunia bisa naik dan juga bisa turun kelas. Hal ini terbukti pada Perang Dunia II, Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi negara pusat turun kelas digantikan Amerika Serikat pasca kehancuran dahsyat di Eropa.

Wallerstein (1987) merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu: kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Sebagai misal negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal sedangkan komoditi primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran. Naik dan turunnya kelas suatu negara tergantung pada kesuksesan pembangunan, bantuan internasional dan gabungan, kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim yang sedang berkuasa.

Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan *Multi National Corporate*. Akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh oleh perusahaan-perusahaan *Multi National Corporate* untuk bekerjasama. Melalui proses ini maka posisi negara pinggiran dapat meningkat menjadi setengah pinggiran. Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Sebagai misal saat ini dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut

PDF Compressor Free Version

mencoba memenangkan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Jika tidak, mungkin dapat saja gagal. Dalam mewujudkan *Multi National Corporate* tentunya dimulai dengan adanya interaksi dan komunikasi antar negara pada kelas manapun. Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Ada banyak sekali kemudahan ketika suatu negara memiliki hubungan yang baik dengan negara lain, diantaranya adalah menekan kecurigaan yang mengacu pada perselisihan, sehingga dengan adanya komunikasi, interaksi dan hubungan antar negara akan semakin akrab dan saling membantu. Selain itu untuk membangun suatu negara agar lebih maju, negara tersebut butuh dukungan yang lebih luas, dalam arti kata, negara butuh pasar yang lebih luas agar semakin berkembang dan menjadi lebih besar. Peran komunikasi dalam menata hubungan internasional adalah *image* yang baik mengenai negara tersebut, tentu setiap negara ingin dilihat baik oleh negara lain, sehingga negara lain dapat tertarik dan menjalin kerjasama dengan negara tersebut di kemudian hari (Denia Dey, 2018).

Kritik terhadap Teori Sistem Dunia :

1. Terlalu memberikan perhatian pada aspek ekonomi.
2. Sistem dunia tidak cukup ketika digunakan pada budaya global yang mempunyai sistem-dunia yang terpisah.
3. Terlalu luas sehingga tidak efektif dalam menganalisis dinamika lokal. Teori sistem dunia mengesampingkan aktifitas, inisiatif masyarakat lokal.

II. Contoh Kasus Teori Sistem Dunia

Salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh pada suatu negara adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses produksi suatu barang/jasa untuk menggerakkan perekonomian. Tenaga kerja Indonesia baik formal maupun informal tidak terlepas dari efek ASEAN *Economic Community*. Pasar bebas yang diterapkan menuntut setiap negara anggota berlomba-lomba dalam bidang perdagangan maupun tenaga kerja. Menjadi malapetaka jika suatu negara kalah bersaing sehingga negaranya dibanjiri tenaga kerja asing. Dan menjadi anugrah jika suatu negara berhasil masuk dalam persaingan tenaga kerja sehingga ia akan bisa menekan angka pengangguran dan mendatangkan devisa. Tingkat pendidikan yang rendah membuat Indonesia diambang bahaya karena akan berakibat pada minimnya penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap daya saing produk dan jasa karena rendahnya kualitas dan kuantitas hasil produksi. Hal ini bisa mendorong masuknya tenaga kerja asing dan produk-produk asing terutama dari negara-negara anggota AEC, dan pemerintah tidak bisa melarang karena sudah adanya perjanjian dan dasar hukum tentang pasar bebas di ASEAN. Masalah lainnya yaitu kesempatan kerja tidak seimbang dengan angkatan kerja sehingga pengangguran dimana-mana, serta ketidakmerataan kesempatan kerja baik antara ruang (*javasentris*), maupun antar sektor (Jepi Adianto dan M Ardiansyah, 2018).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi selama tahun 2011-2016, Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) rata-rata 71.776 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Hingga pada November 2016 tercatat 74.183 tenaga kerja asing atau meningkat 7,5 persen dari posisi akhir 2015 yaitu sebanyak 69.025 tenaga kerja asing. Tenaga profesional asing masih banyak dipertahankan dan dipekerjakan di Indonesia untuk menduduki posisi-posisi tertentu terutama di perusahaan besar yang skala dan orientasinya lingkup internasional. Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, India, Malaysia, Filipina, Amerika Serikat, Australia, dan Thailand masih tetap mendominasi jumlah total TKA yang bekerja di Indonesia. Negeri Ginseng merupakan terbanyak ke-2 setelah Republik Rakyat Tiongkok dimana pada periode Januari-November 2016 mencapai 12.490 atau sekitar 16,8 % dari total tenaga kerja asing di Indonesia. Melihat data dan fakta yang terjadi dengan ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah, pelaku bisnis dan para tenaga kerja Indonesia harus mempersiapkan kualitas dan profesionalitas dari tenaga kerja dalam negeri untuk menghadapi tantangan dan peluang ASEAN Economy Community agar bisa bersaing dengan negara ASEAN khususnya dan

PDF Compressor Free Version
 internasional umumnya. Warga Indonesia harus bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri bukan menjadi penonton tenaga kerja asing, Maka tenaga kerja terampil sangat dibutuhkan untuk menghadapi ASEAN Economy Community (Jepi Adianto dan M Ardiansyah, 2018).

Salah satu sektor pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja adalah sektor industri, misalnya industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja seiring dengan peningkatan investasi dan ekspansi. Hal ini menjadi salah satu efek berantai dari aktifitas industrialisasi yang sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tahun 2018, sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14,72% terhadap total tenaga kerja nasional. Selama periode empat tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja industri mengalami peningkatan. Tahun 2015, industri membuka lapangan kerja sebanyak 15,54 juta orang, kemudian naik menjadi 15,97 orang pada tahun 2016. Tahun 2017 sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja hingga 17,56 juta orang dan meningkat menjadi 18,25 juta orang pada tahun 2018, sehingga dari periode 2015 sampai dengan 2018 terjadi kenaikan rata-rata 17,40%.

Adapun sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah industri makanan dengan kontribusi hingga 26,67%, industri pakaian jadi 13,69%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus 9,93%, industri tekstil 7,46%, industri barang galian bukan logam 5,72%, serta industri furnitur 4,51%.

Tiga pilar utama yang perlu menjadi perhatian untuk memacu pertumbuhan industri nasional, yaitu investasi, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan SDM yang terampil sangat diperlukan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri. Apalagi di era revolusi industri 4.0 yang bergulir saat ini, membutuhkan tenaga kerja kompeten terutama dalam penguasaan teknologi digital. Upaya ini sesuai implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, yang salah satu program prioritasnya adalah meningkatkan kualitas SDM. Kemudian dari tiga pilar utama tersebut, Indonesia memiliki modal dan potensi besar dalam pengembangan SDM. Hal ini tidak terlepas dari momentum bonus demografis yang sedang dinikmati hingga 15 tahun ke depan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini mengamanatkan agar lebih fokus dan gencar menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi, setelah fokus pada pembangunan infrastruktur.

Upaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0, dalam penguatan kualitas SDM, perlu dilakukan melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program *talent mobility* untuk profesional. Implementasi dari kebijakan tersebut adalah perubahan kurikulum pendidikan dengan menekankan pada bidang science, technology, engineering, arts dan mathematics (STEAM). Selain itu, fokus untuk meningkatkan kualitas unit pendidikan vokasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan teori sistem dunia dari berbagai macam sumber buku literatur, dengan menganalisis kondisi kebijakan pemenuhan tenaga kerja kompeten di Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

Indonesia masih berpeluang besar memacu daya saing sektor industri di tengah ketidakpastian kondisi global. Potensi ini seiring adanya peningkatan investasi dan produktivitas manufaktur sehingga dapat mendorong nilai tambah bahan baku dalam negeri hingga memacu ekspor. Mengacu data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) pada tahun 2018, dilihat dari sisi manufacturing value added, industri pengolahan trennya terus membaik.

Merujuk data UNIDO tersebut, nilai tambah industri nasional meningkat hingga USD34 miliar, dari tahun 2014 yang mencapai USD202,82 miliar menjadi USD236,69 miliar di tahun 2018. Saat ini, Indonesia masuk 10 besar dunia sebagai negara industri yang

bernilai tambah tinggi. Bahkan, ketika ingin mengukur kontribusi industri terhadap perekonomian negara, Indonesia berada di peringkat kelima dunia. Hal ini berdasarkan data World Bank tahun 2017, yang menunjukkan bahwa negara-negara industri di dunia, kontribusi sektor manufakturnya terhadap perekonomian rata-rata sekitar 17%. Adapun lima negara yang sektor industri manufakturnya mampu menyumbang di atas rata-rata tersebut, yakni China (28,8%), Korea Selatan (27%), Jepang (21%), Jerman (20,6%), dan Indonesia (20,5%).

Sedangkan, negara-negara dengan kontribusi industrinya di bawah 17 %, antara lain Meksiko, India, Italia, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Brasil, Perancis, Kanada dan Inggris. Artinya, produk domestik bruto (PDB) sektor manufaktur Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asean. Data Kementerian Perindustrian, pada tahun 2015, sektor industri pengolahan nonmigas menyumbang sebesar Rp. 2.098,1 triliun terhadap PDB nasional, meningkat 21,8 % menjadi Rp. 2.555,8 triliun di tahun 2018. Data lainnya memperlihatkan, industri manufaktur di Indonesia masih menunjukkan hasrat untuk terus meningkatkan produktivitas dan perluasan usaha guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Ini tercermin dari laporan Nikkei, di mana indeks manajer pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) Indonesia sepanjang tahun 2018 rata-rata berada pada level di atas 50 atau menandakan sektor manufaktur tengah ekspansif.

Upaya peningkatan kompetensi SDM dimaksud bertujuan untuk pemenuhan tenaga kerja pada sektor industri. Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*) dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Terkait dengan Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia, terutama setelah dimulainya MEA, persaingan dalam dunia kerja sungguh terasa. Banyak orang asing berdatangan ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Pekerja asing atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Asing (TKA), menurut pasal 1 angka 1 Permenaker 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA sebagaimana diubah oleh Permenaker 35/2015, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Meskipun banyak TKA yang datang ke Indonesia, namun mereka tidak dapat langsung bekerja begitu saja. Dikarenakan setiap tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia, sangat dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, dan agar terjadi persaingan yang sehat, ada beberapa persyaratan ketat yang harus dipenuhi, baik oleh TKA maupun pemberi kerja TKA.

Menurut pasal 36 ayat (1) Permenaker 16/2015, TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

PDF Compressor Free Version

1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia
6. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan.

Pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan (termasuk kebijakan dan program) haruslah mempunyai kredibilitas, daya tarik, kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan agar masyarakat dapat dipengaruhi untuk mengikuti keinginan dari pemerintah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang pembangunan.

Peran komunikasi dalam pengembangan bidang ketenagakerjaan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Jika kita melihat peran pembangunan seperti pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, kita bisa melihat bahwa komunikasi mempunyai peran yang penting, khususnya ketika berhadapan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja harus diberi informasi (melalui media personal dan non personal), dimotivasi oleh penyuluh (agen pembaharu) untuk dapat menerima ide, pengetahuan dan teknologi baru sehingga berani memutuskan masa depannya. Menurut Gumilar (2009), komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan.

Pengertian komunikasi pemerintahan dalam arti menggabungkan kedua makna yaitu komunikasi dan pemerintahan maka pengertian komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Hasan, 2005). Arti dari komunikasi pemerintahan di sini adalah pemerintah dalam hal ini diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat.

Komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana/kebijakan pembangunan. Setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Oleh karena itu, pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan. Pemerintah dapat bersinergi dengan berbagai pihak atau komponen, seperti sektor industri sebagai pengguna tenaga kerja, lembaga pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja terampil, agen perubahan, media massa, tenaga kerja, serta masyarakat pada umumnya. Strategi yang tepat melalui pendekatan teori konvergensi yang didasarkan pada model komunikasi yang sirkular dan lebih manusiawi menggantikan model/teori komunikasi searah/linear yang cenderung bersifat *top down*. yang umum dianut selama ini (Muhcri Rahma, 2019).

Pendekatan teori konvergensi berarti berusaha menuju suatu pengertian yang lebih bersifat timbal balik di antara partisipan komunikasi dalam hal pengertian, perhatian, kebutuhan ataupun titik pandang. Selain itu ditingkatkan pula partisipasi semua pihak yang ikut serta dalam proses komunikasi demi tercapainya suatu fokus bersama dalam memandang permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, pendekatan ini bertitik tolak

PDF Compressor Free Version

daripada dialog antar semua pihak dan bukan hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja. Konvergensi disebut dengan meleburkan pandangan atau menyatu, konvergensi sebagai strategi dimana individu beradaptasi terhadap perilaku komunikator satu sama lain (West & Turner, 2008). Model konvergensi menganggap bahwa komunikasi merupakan transaksi diantara partisipan yang setiap orang memberikan kontribusi pada transaksi tersebut, meskipun dalam derajat yang berbeda (Liliweri, 2001).

V. KESIMPULAN

Teori World System telah memberikan dasar pemikiran terkait bagaimana klasifikasi antar negara di dalam Teori *World System* mengelompokkan negara yang didasari atas penguasaan ekonomi, kapital, industri dan teknologi yang mereka miliki. Problematika yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang adalah kurangnya tenaga kerja yang dapat menggerakkan industri mereka, utamanya pada tenaga kerja terampil level ahli sehingga impor tenaga kerja dari negara lain menjadi sebuah keharusan. Disamping itu kebijakan pengiriman tenaga kerja keluar negeri yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran didalam negeri.

Keterbatasan kompetensi SDM yang tersedia dalam negeri sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, maka pembangunan tenaga kerja (SDM) sektor industri melalui Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi, Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; dan/atau Pemagangan Industri berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perlu terus ditingkatkan.

Produktivitas tenaga kerja sektor industri harus terus dilaksanakan dengan kegiatan antara lain; penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi; pendirian politenik/ akademi komunitas industri berbasis kompetensi; pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan kebutuhan perusahaan industri; pelatihan *three in one* (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) untuk sektor industri prioritas; pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP, TUK, assesor kompetensi); penyusunan RSKKNI SDM Industri; peningkatan kemampuan *soft skill* SDM industri; serta pembangunan *Center of Excellence* Industri sebagai pusat pengembangan industri. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk pemenuhan tenaga kerja terampil level ahli agar tidak selamanya tergantung pada impor tenaga kerja dari luar.

Dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan, pemerintah perlu mengoptimalkan peran komunikasi antar berbagai pihak (pemerintah, sektor industri, lembaga pendidikan kompetensi, media massa dan masyarakat secara luas) agar tercipta suatu sinergisme dan keselarasan melalui pendekatan teori komunikasi konvergensi. Komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana serta kebijakan pembangunan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Age, a. I., Obinne, C. P. O., & Demenongu, T. S. 2012. Communication for Sustainable Rural and Agricultural Development in Benue State, Nigeria. *Sustainable Agriculture Research*, 1(1), 118–129. <https://doi.org/10.5539/sar.v1n1p118>
- Alfian Dwi Jalaputra. 2020. Analisis Teori *World System* Terhadap *Special Skilled Worker* : Studi Kasus Tenaga Kerja Vietnam Ke Jepang Tahun 2019. Fakultas Komunikasi dan Diplomasi. Universitas Pertamina, Jakarta
- Arif Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dilla, S. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. (N. S. Nurbaya, Ed). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Farihanto, M. N. 2016. Dinamika Komunikasi dalam Pembangunan Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*

PDF Compressor Free Version

- Jalanan, H. 2012. Costs and Benefits Cross Country Labour in the GMS. Singapore. ISEAS
- Jepi Adiando dan M Ardiansyah. 2018. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Asean Economy Community. Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1 No 2 2018. UNPAD
- Kasnawi, Tahir dan Sulaiman Asang. 2016. Dalam Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial. Diambil dari <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/IPEM443>
- Kementerian Perindustrian. 2019. Arah Kebijakan Pembangunan Industri Nasional
- Maiwan, Muhammad. 2017. Geografi, Geopolitik, Dan Globalisasi: Suatu Analisa Terhadap Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein. Jurnal SPATIAL, Vol 17. No 1, Maret 2017
- Muir, Richard. 2012. *Political Geography: A New Introduction*, London: MACMILLAN PRESS LTD.,
- Muhcri Rahma. 2019. Komunikasi Pembangunan Dalam Perspektif Terkini. <http://jurnal.untad.ac.id/>. Vol 1 No. 2
- Liliweri, Alo (2001) *Gatra – Gatra Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 1995. *The Measurement of Science and Technological Activities: The Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T. (Canberra Manual)*. Paris: OECD.
- Priatama, D. 2013. Strategi Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Sosialisasi Program Pembinaan Masyarakat di Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda. *Ilmu Komunikasi*, 1(2)
- Sulaiman, A. I. 2013. Model Komunikasi Formal Dan Informal Dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(2)
- Sumanto, 2014. Hubungan Industrial, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta
- Suwarsono dan Alvin Y.So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Wallerstein, Immanuel. 1974. *The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the Uropean. World Economy in the Sixteenth Century*, New York: Academic Press
- Wallerstein, Immanuel. 1984. *The Politics of the Capitalist World-Economy*, Cambridge: Cambridge University Press
- Wallerstein, Immanuel. 1987. “World Sytem Analysis”, dalam Anthony Giddens and Jonathan Turner (eds.), *Social Theory Today*, Stanford: Stanford University Pers
- West, Richard, dan Lynn H. Turner 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi, Edisi: 3*. Jakarta: Salemba Humanika.